

Sosialisasi dan Penguatan Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan kepada Masyarakat melalui Program Kemandirian Barbershop dalam Kegiatan BAPAS Peduli (Studi : Balai Pemasyarakatan Bandung)

**Krisna Asma Saeful Daulah¹, Rafli Aldira Ramadhan², Rifqi Murtadho
Senoputro³, Muhammad Ali Equatora⁴, Ali Muhammad⁵, Qisthina Aulia⁶**
^{1,2,3,4,5,6} Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

Received : 31 Oktober 2025, Revised : 6 November 2025, Published : 13 November 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Krisna Asma Saeful Daulah

E-mail: ramadhanaldirarafli@gmail.com

Abstrak

Naskah kebijakan ini mengkaji permasalahan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan pasca-pidana yang masih menghadapi stigma, penolakan, dan minimnya dukungan komunitas. Berdasarkan hasil Kuliah Kerja Nyata (KKN) Taruna Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Tahun 2025 di Bapas Kelas I Bandung dan Yayasan Anugrah Insan Residivist, ditemukan bahwa pendekatan berbasis komunitas, seperti program pelatihan barbershop dan kegiatan Bapas Peduli di ruang publik, efektif membangun kepercayaan masyarakat. Evaluasi terhadap kebijakan reintegrasi sosial menunjukkan bahwa implementasi di lapangan belum sepenuhnya responsif terhadap tantangan sosial dan psikologis yang dihadapi klien. Oleh karena itu, naskah ini menawarkan alternatif kebijakan yang mencakup: penguatan peran POKMAS LIPAS sebagai fasilitator komunitas, integrasi layanan sosial publik dengan program keterampilan klien, serta kolaborasi lintas sektor yang sistemik dan berkelanjutan. Rekomendasi diarahkan pada advokasi kebijakan berbasis komunitas, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta replikasi model praktik baik ke wilayah lain dengan dukungan regulasi dan partisipasi publik yang lebih kuat.

Kata kunci – reintegrasi sosial, klien pemasyarakatan, BAPAS, kemandirian, barbershop, keadilan restoratif

Abstract

This policy paper examines the issue of social reintegration for post-incarceration correctional clients who continue to face stigma, rejection, and limited community support. Based on the results of the Community Service Program (KKN) conducted by students of the Correctional Guidance Study Program, Polytechnic of Correctional Science (Politeknik Ilmu Pemasyarakatan) in 2025 at the Class I Correctional Supervision Office (Bapas) Bandung and the Anugrah Insan Residivist Foundation, it was found that community-based approaches—such as barbershop training programs and the Bapas Peduli public outreach activities—are effective in building public trust. Evaluation of the current social reintegration policy shows that its implementation in the field has not been fully responsive to the social and psychological challenges faced by clients. Therefore, this paper proposes alternative policy directions, including: strengthening the role of POKMAS LIPAS as a community facilitator; integrating public social services with client skill development programs; and fostering systemic and sustainable cross-sector collaboration. The recommendations are directed toward community-based policy advocacy, institutional capacity building, and replication of best practice models in other regions with stronger regulatory support and greater public participation.

Keywords – social reintegration, correctional clients, BAPAS, self-reliance, barbershop, restorative justice

How to Cite : Daulah, K. A. S., Ramadhan, R. A., Senoputro, R. M., Equatora, M. A., Muhammad, A., & Aulia, Q. (2025). *Sosialisasi dan Penguatan Reintegrasi Sosial Klien Pemasarakatan kepada Masyarakat melalui Program Kemandirian Barbershop dalam Kegiatan BAPAS Peduli (Studi : Balai Pemasarakatan Bandung)*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(2), 1707 - 1715. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i2.682>

Copyright ©2025 Krisna Asma Saeful Daulah, Rafli Aldira Ramadhan, Rifqi Murtadho Senoputro, Muhammad Ali Equatora, Ali Muhammad, Qisthina Aulia

PENDAHULUAN

Reintegrasi sosial merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pemasarakatan, yang bertujuan untuk mengembalikan klien pemasarakatan ke tengah-tengah masyarakat secara utuh dan bermartabat. Dalam konteks ini, keberhasilan reintegrasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan individu klien, tetapi juga sangat bergantung pada penerimaan sosial dari lingkungan sekitar. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa stigma negatif dan diskriminasi terhadap mantan narapidana masih menjadi hambatan signifikan yang menghalangi proses pemulihan sosial secara menyeluruh (Lestari, D., & Febriani, 2020).

Mantan narapidana seringkali menghadapi berbagai tantangan ketika kembali ke masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun psikologis. Mereka kerap dianggap sebagai ancaman atau beban sosial, sehingga mengalami penolakan dalam dunia kerja, keterbatasan akses terhadap layanan publik, hingga kesulitan dalam membangun kembali relasi sosial yang sehat. Padahal, berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dan hak asasi manusia, setiap individu yang telah menyelesaikan masa pidananya berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif bagi lingkungannya (Zehr, 2002).

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Bandung menginisiasi kegiatan Bapas Peduli, sebagai bentuk konkret dari program reintegrasi sosial yang adaptif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk kegiatan yang menonjol dalam program ini adalah pelatihan dan penyediaan layanan barbershop atau jasa pangkas rambut gratis kepada masyarakat. Program kemandirian ini tidak hanya menjadi sarana pelatihan keterampilan bagi klien pemasarakatan, tetapi juga berfungsi sebagai media sosialisasi, edukasi, dan interaksi langsung dengan masyarakat luas.

Pemanfaatan program barbershop dalam kegiatan Bapas Peduli memiliki signifikansi strategis dalam membangun jembatan sosial antara klien dan masyarakat. Klien yang terlibat dalam layanan ini tidak hanya menunjukkan keterampilan dan etos kerja yang positif, tetapi juga membuktikan komitmen mereka dalam berubah dan kembali menjadi bagian produktif dari komunitas. Masyarakat pun diajak untuk melihat sisi lain dari para klien pemasarakatan—bukan sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai individu yang sedang dalam proses pemulihan dan pemberdayaan.

Kegiatan ini juga melibatkan Yayasan Anugrah Insan *Residivis* (AIR) Bandung sebagai POKMAS LIPAS (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan), yang berperan aktif dalam membina dan mendampingi mantan narapidana secara berkelanjutan. Kolaborasi antara Bapas, POKMAS, dan elemen masyarakat menjadi pilar penting dalam menciptakan ekosistem sosial yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Dengan latar belakang tersebut, kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Bapas Kelas I Bandung dan Yayasan Anugrah Insan *Residivis* ini mengambil fokus pada "Sosialisasi dan Penguatan Reintegrasi Sosial Klien Pemasarakatan kepada Masyarakat melalui Program Kemandirian Barbershop". Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran masyarakat serta memperkuat kapasitas klien dalam menghadapi kehidupan sosial pasca-pemidanaan secara bermartabat dan mandiri.

METODE

Kegiatan ini menggunakan pendekatan intervensi sosial makro yang menekankan kolaborasi antara klien pemasarakatan, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memperkuat proses reintegrasi sosial. Pendekatan ini dilakukan secara terpadu melalui empat metode utama yang saling mendukung, yaitu:

1. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan ini menempatkan klien, masyarakat, dan pemangku kepentingan sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Melalui teknik *Participatory Rural Appraisal* (PRA),

kebutuhan komunitas dan potensi sosial diidentifikasi guna merancang program yang sesuai dengan konteks lokal dan kesiapan klien pemasarakatan (Chambers, 1994).

2. Pendekatan Edukatif

Diterapkan untuk menumbuhkan kesadaran dan keterampilan melalui kegiatan pembelajaran langsung. Bentuk kegiatan mencakup:

- a. Pelatihan keterampilan barbershop pada 23 Juli 2025 di Yayasan Anugrah Insan Residivis (YAIR) yang berfokus pada keterampilan teknis dan etika pelayanan.
- b. Sosialisasi dan layanan potong rambut gratis pada 29 Juli 2025 di Alun-Alun Kota Bandung, yang menjadi sarana interaksi antara klien dan masyarakat dalam rangka menumbuhkan penerimaan sosial.

3. Pendekatan Pengorganisasian Sosial

Bertujuan memperkuat sinergi antar pihak dengan membentuk struktur kerja kolaboratif yang melibatkan Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Bandung, POKMAS LIPAS (YAIR), dan taruna Poltekip. Pendekatan ini memastikan kegiatan berjalan sistematis, efisien, dan berorientasi hasil, serta mengintegrasikan peran pembimbing kemasyarakatan dengan komunitas lokal.

4. Teknik *Community-Based Correction* (CBC)

Metode ini menjadi inti dari pelaksanaan kegiatan, di mana program barbershop digunakan sebagai media rehabilitasi berbasis komunitas. Melalui kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat, klien diarahkan untuk membangun etos kerja, keterampilan sosial, serta tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu:

- 1) Inisiasi sosial, berupa koordinasi antara Bapas, YAIR, dan taruna untuk merumuskan tujuan dan sasaran kegiatan;
- 2) Asesmen komunitas, untuk mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat, kebutuhan klien, serta potensi dukungan lingkungan;
- 3) Perencanaan program, mencakup penyusunan jadwal kegiatan, pembagian peran, dan penyiapan sarana pelatihan;
- 4) Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi publik, melalui kegiatan barbershop dan penyuluhan masyarakat;
- 5) Evaluasi dan terminasi, yang dilakukan untuk menilai capaian kegiatan serta merumuskan tindak lanjut pembinaan klien pasca kegiatan.

Data kegiatan dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi selama proses berlangsung. Evaluasi keberhasilan dilakukan dengan refleksi partisipatif antara klien, taruna, dan pembimbing untuk menilai perubahan keterampilan, perilaku, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap klien pemasarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inisiasi Sosial

Tahap inisiasi sosial dalam praktik intervensi sosial makro berperan sebagai fase fundamental dalam membangun relasi antaraktor sosial dan menentukan arah kolaborasi strategis. Sejalan dengan pandangan Pratiwi & Priatmono (2024), inisiasi sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengenalan konteks lapangan, tetapi juga sebagai proses konstruksi kepercayaan dan legitimasi sosial yang diperlukan untuk keberhasilan intervensi berbasis komunitas.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa proses inisiasi bersama Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Bandung dan Yayasan Anugrah Insan Residivist (YAIR) berhasil mengidentifikasi kebutuhan prioritas dalam reintegrasi sosial klien, yakni penurunan stigma sosial, penguatan kemandirian ekonomi, dan penyediaan ruang interaksi publik yang aman. Temuan ini mengafirmasi teori partisipasi sosial Cohen & Uphoff (1980) yang menekankan bahwa keberhasilan intervensi bergantung pada kualitas hubungan horizontal antaraktor lokal, bukan hanya koordinasi formal antarinstansi.

Pendekatan partisipatif yang diterapkan selama inisiasi mendorong munculnya rasa kepemilikan bersama (*sense of ownership*) antara lembaga pemasarakatan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Melalui mekanisme kesepakatan program dan penetapan indikator keberhasilan, terbentuk model kerja kolaboratif yang menjunjung prinsip keadilan restoratif, yaitu

pemulihan hubungan sosial antara klien, masyarakat, dan negara (Zehr, 2015). Dengan demikian, inisiasi sosial berfungsi sebagai fondasi normatif dan operasional bagi terbangunnya ekosistem reintegrasi berbasis komunitas.



Gambar 1. Inisiasi sosial antara Taruna Poltekip dan Bapas Kelas I Bandung (a), Yayasan Anugrah Insan Residivis (b)

Pengorganisasian Sosial

Pengorganisasian sosial merupakan tahap strategis dalam intervensi sosial makro yang bertujuan menciptakan koordinasi efektif antaraktor pelaksana (Zulkifli, 2020). Dalam kegiatan KKN Bimbingan Kemasyarakatan, proses ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara Bapas Kelas I Bandung, Yayasan Anugrah Insan Residivist (YAIR), taruna, dan masyarakat. Koordinasi internal dengan Pembimbing Kemasyarakatan berfokus pada perencanaan teknis, penentuan peserta klien, serta mekanisme pelaporan kegiatan. Sementara itu, YAIR berperan sebagai mitra pelatihan yang menyediakan fasilitas, mentor profesional, serta dukungan pembinaan spiritual bagi klien. Pemilihan peserta dilakukan berdasarkan asesmen kesiapan dan motivasi mengikuti program, dengan pendekatan persuasif agar klien memahami makna pelatihan sebagai sarana membangun kemandirian dan kepercayaan sosial.

Selain itu, kegiatan "Bapas Peduli" diorganisir melalui konsolidasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah kelurahan, DKM Masjid Agung Bandung, dan komunitas lokal. Taruna bertindak sebagai penggerak lapangan yang menjembatani komunikasi antar lembaga sekaligus mengedukasi masyarakat. Sinergi ini menunjukkan integrasi antara teori intervensi sosial dan praktik keadilan restoratif yang menekankan nilai kolaborasi dan pemberdayaan komunitas.



Gambar 2. Koordinasi pelaksanaan program antara Bapas, YAIR, dan Taruna Poltekip.

Asesmen Sosial

Asesmen sosial merupakan tahapan awal dalam intervensi makro yang bertujuan mengidentifikasi kebutuhan, potensi, dan permasalahan sosial di lapangan. Tahap ini menjadi dasar dalam merancang strategi serta menilai efektivitas kebijakan reintegrasi sosial. Dalam kegiatan KKN

Bimbingan Kemasyarakatan, asesmen dilakukan secara kualitatif melalui observasi, wawancara informal, dan telaah dokumen kelembagaan. Asesmen ini meliputi dua aspek, diantaranya :

1. Asesmen Komunitas.

Asesmen komunitas difokuskan pada masyarakat sekitar Alun-Alun Kota Bandung, lokasi kegiatan Bapas Peduli. Hasil pengamatan menunjukkan sebagian masyarakat belum memahami konsep reintegrasi sosial dan masih memiliki stigma terhadap mantan narapidana. Namun, kegiatan layanan sosial seperti pangkas rambut gratis efektif menarik partisipasi publik dan menjadi media interaksi positif antara klien dan masyarakat. Pendekatan partisipatif ini dinilai mampu menumbuhkan empati dan mengubah persepsi masyarakat, sehingga penting untuk diterapkan secara berkelanjutan di wilayah lain.



Gambar 3. Interaksi antara klien pemasyarakatan dan masyarakat melalui kegiatan "Bapas Peduli"

2. Asesmen Kebijakan Reintegrasi Sosial

Asesmen kebijakan diarahkan pada implementasi kebijakan reintegrasi sosial oleh Bapas Kelas I Bandung sesuai Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan telah diterapkan secara nyata melalui pelatihan keterampilan dan sosialisasi publik bersama Yayasan Anugrah Insan Residivist. Program ini berhasil memberdayakan klien tanpa menimbulkan resistensi masyarakat. Namun, dukungan daerah dan jangkauan informasi masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor dan penguatan peran POKMAS LIPAS agar proses reintegrasi sosial berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Perencanaan Sosial

Perencanaan sosial merupakan tahap penting dalam intervensi makro yang berfungsi merancang langkah-langkah strategis untuk mencapai perubahan sosial yang diinginkan. Dalam konteks kegiatan KKN ini, perencanaan sosial melibatkan dua aspek utama diantaranya :

1. Perencanaan Komunitas

Perencanaan komunitas difokuskan pada upaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan dan keberlanjutan program pelatihan barbershop yang digagas bersama Bapas Kelas I Bandung dan Yayasan Anugrah Insan Residivist (YAIR). Berdasarkan hasil asesmen sebelumnya, masyarakat sekitar Alun-Alun Kota Bandung dan komunitas tempat klien berdomisili ditetapkan sebagai sasaran utama program. Kebutuhan yang diidentifikasi meliputi peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penerimaan mantan narapidana, penyediaan ruang interaksi yang humanis, dan kegiatan sosial yang memberi manfaat langsung.



Gambar 4. kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Reintegrasi Sosial

Perencanaan ini diwujudkan melalui kegiatan Bapas Peduli yang menghadirkan layanan pangkas rambut gratis oleh klien binaan, distribusi brosur edukatif, dialog publik antara masyarakat dan Pembimbing Kemasyarakatan, serta testimoni dari klien yang telah berhasil mandiri. YAIR bertanggung jawab atas pendampingan teknis dan penyediaan fasilitas, sedangkan Bapas berperan sebagai fasilitator kegiatan. Taruna Prodi Bimbingan Kemasyarakatan berperan sebagai penggerak lapangan sekaligus penghubung antar pihak. Keberlanjutan kegiatan dirancang melalui pembentukan komunitas mini berbasis keterampilan, di mana alumni pelatihan dapat mengembangkan usaha bersama dengan dukungan masyarakat dan pendampingan POKMAS LIP

2. Perencanaan Kebijakan Reintegrasi Sosial

Perencanaan kebijakan diarahkan untuk mendukung advokasi program kemandirian sebagai bagian dari kebijakan reintegrasi sosial sesuai dengan Permenkumham No. 3 Tahun 2018. Melalui koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan pimpinan Bapas, disepakati bahwa pelatihan barbershop diintegrasikan ke dalam sistem pembimbingan klien dewasa, dan hasil pelatihan dapat digunakan sebagai indikator kemajuan klien dalam proses integrasi sosial.

Strategi advokasi dilakukan dengan mendokumentasikan kegiatan secara sistematis, menyusun policy brief untuk diajukan kepada instansi terkait, serta mempublikasikan hasil kegiatan melalui media sosial resmi Bapas dan YAIR guna memperkuat dukungan publik. Langkah ini tidak hanya memperkuat legitimasi program, tetapi juga membuka peluang replikasi model pembinaan keterampilan lain seperti sablon atau kuliner.

Selain itu, kegiatan ini membuka peluang kolaborasi lintas sektor antara Bapas, dinas terkait, yayasan, dan pelaku usaha lokal untuk membangun ekosistem sosial ekonomi yang mendukung keberlanjutan reintegrasi klien pemasarakatan. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pembinaan yang terstruktur, adaptif, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

Pelaksanaan Intervensi

Pelaksanaan intervensi merupakan tahap krusial dalam praktik Bimbingan Kemasyarakatan makro yang berfungsi menerjemahkan hasil perencanaan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Dalam kegiatan KKN ini, intervensi dilakukan melalui dua jalur yang saling melengkapi, diantaranya :

1. Intervensi Komunitas

Intervensi komunitas diarahkan untuk membangun kesadaran sosial, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana, serta menciptakan ruang interaksi yang inklusif antara klien dan masyarakat. Kegiatan pertama berupa pelatihan keterampilan barbershop pada 23 Juli 2025 di Yayasan Anugrah Insan Residivist, diikuti oleh 10 klien binaan. Pelatihan ini menekankan peningkatan kemampuan teknis, penerapan etika layanan, dan tanggung jawab sosial. Pendampingan dilakukan oleh pelatih profesional, taruna sebagai fasilitator, serta Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai pengawas sosial. Program ini tidak hanya memperkuat keterampilan ekonomi klien, tetapi juga menumbuhkan motivasi untuk mandiri dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Kegiatan kedua, Bapas Peduli, dilaksanakan pada 29 Juli 2025 di Alun-Alun Kota Bandung dengan melibatkan lebih dari 150 warga. Klien memberikan layanan potong rambut gratis, membagikan brosur edukatif, dan berdialog langsung dengan masyarakat. Interaksi ini disambut positif dan terbukti efektif dalam menumbuhkan empati sosial, menurunkan stigma terhadap mantan narapidana, serta meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya reintegrasi sosial yang berkeadilan



Gambar 5. kegiatan pelatihan barbershop bagi klien pemasyarakatan

2. Intervensi Kebijakan Sosial

Intervensi kebijakan sosial berfokus pada penguatan kolaborasi antarinstansi dan penerapan nilai-nilai restoratif dalam sistem pemasyarakatan. Kolaborasi ini melibatkan Bapas Kelas I Bandung sebagai pelaksana utama, Yayasan Anugrah Insan Residivist sebagai mitra pembinaan, Pemerintah Kelurahan Balonggede sebagai fasilitator wilayah, serta masyarakat dan taruna sebagai pelaksana lapangan. Sinergi ini menjadi model kecil penerapan restorative justice yang partisipatif dan berbasis komunitas.

Melalui pelibatan klien dalam layanan publik, kegiatan ini berhasil menanamkan nilai-nilai keadilan restoratif secara konkret, menggeser paradigma pembinaan dari yang semula berbasis lembaga menjadi berbasis masyarakat. Selain itu, intervensi ini juga berperan sebagai bentuk advokasi berbasis aksi (action-based advocacy), yang mendorong kesadaran kelembagaan tentang pentingnya kolaborasi nyata dalam memperkuat proses reintegrasi sosial.

Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan KKN dalam memperkuat reintegrasi sosial klien pemasyarakatan melalui pelatihan barbershop dan sosialisasi "Bapas Peduli." Fokus utama evaluasi meliputi perubahan sikap masyarakat, tingkat partisipasi publik, serta dampak psikososial terhadap klien.

1. Indikator Evaluasi

Penilaian didasarkan pada empat indikator utama, yaitu tingkat partisipasi masyarakat, respons terhadap keterlibatan klien, perubahan persepsi publik, dan antusiasme dalam mengikuti kegiatan. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara informal, serta dokumentasi lapangan berupa foto dan narasi kegiatan.

2. Hasil Evaluasi Kegiatan

Kegiatan "Bapas Peduli" pada 29 Juli 2025 menunjukkan respons publik yang sangat positif. Lebih dari 150 warga berpartisipasi dalam layanan potong rambut gratis yang dilakukan oleh klien pemasyarakatan. Masyarakat tampak antusias berinteraksi, memberikan testimoni positif, bahkan mengajak keluarga untuk ikut serta. Suasana kegiatan berlangsung terbuka dan setara, menunjukkan berkurangnya stigma sosial terhadap mantan narapidana.

Penyuluhan dan distribusi brosur edukatif juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep pemasyarakatan modern dan pentingnya dukungan sosial terhadap klien. Sementara itu, klien merasakan peningkatan kepercayaan diri, kebanggaan, dan motivasi untuk mengembangkan keterampilan yang diperoleh. Bapas Kelas I Bandung dan Yayasan Anugrah Insan Residivist menilai kegiatan ini berhasil menjadi contoh konkret model reintegrasi sosial berbasis komunitas.

3. Analisis Efektivitas

program ini dinilai efektif dalam menciptakan ruang sosial yang inklusif dan memperkuat hubungan antara klien dan masyarakat. Interaksi langsung terbukti menumbuhkan empati publik dan mengurangi stigma negatif. Namun, efektivitas masih terbatas pada skala lokal dan waktu tertentu. Oleh karena itu, kegiatan serupa disarankan untuk direplikasi secara berkala di wilayah lain, dengan pelibatan tokoh masyarakat, lembaga sosial, dan media lokal agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.



Gambar 6. Kegiatan evaluasi akhir kegiatan "Bapas Peduli

Terminasi dan Rujukan Sosial.

Tahap terminasi dilakukan secara terencana melalui penyerahan hasil kegiatan dan rekomendasi kepada Bapas dan Yayasan mitra. Proses ini menunjukkan praktik reflektif dalam intervensi sosial, di mana setiap aktor tidak hanya menutup program secara administratif, tetapi juga menegaskan keberlanjutan melalui rencana aksi konkret.

Rekomendasi utama meliputi replikasi pelatihan barbershop secara periodik, penyelenggaraan sosialisasi publik berkala, serta pelibatan alumni klien sebagai pendamping sebaya. Strategi ini mendukung terbentuknya ekosistem reintegrasi sosial yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam perspektif kebijakan sosial, terminasi yang disertai mekanisme rujukan dan keberlanjutan menjadi indikator kedewasaan program intervensi, sebagaimana ditegaskan Payne (2021) bahwa keberhasilan intervensi sosial diukur dari kemampuan program untuk bertahan dan berkembang setelah fase proyek berakhir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Permasalahan utama dalam upaya reintegrasi sosial klien pemasarakatan terletak pada masih rendahnya kesadaran sosial masyarakat terhadap pentingnya menerima kembali mantan narapidana sebagai bagian dari komunitas. Meskipun kebijakan dan program pemasarakatan telah dirancang secara normatif untuk mendukung proses reintegrasi, namun pada praktiknya penerimaan masyarakat sering kali terhambat oleh stigma, prasangka, dan minimnya pemahaman terhadap pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan hasil observasi dan pelaksanaan program KKN Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan Prodi Bimbingan Kemasyarakatan Tahun 2025, diketahui bahwa keterlibatan langsung klien dalam kegiatan publik—seperti layanan barbershop gratis pada kegiatan "Bapas Peduli"—telah berhasil menciptakan ruang dialog, membangun kepercayaan, dan membuka perspektif baru di tengah masyarakat. Ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas lebih efektif dalam memfasilitasi pemulihan hubungan sosial.

Dari hasil evaluasi dan refleksi kegiatan, beberapa alternatif kebijakan yang layak untuk diterapkan ke depan antara lain:

1. Perluasan program reintegrasi sosial melalui intervensi yang melibatkan klien secara aktif dalam pelayanan masyarakat,
2. Penguatan peran POKMAS LIPAS sebagai agen sosial yang menjembatani hubungan antara Bapas, klien, dan masyarakat, serta

3. Pengembangan kolaborasi lintas sektor antara institusi negara, lembaga masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta guna menjamin keberlanjutan, sumber daya, dan legitimasi sosial dari program-program reintegrasi yang dijalankan.

Dengan mengedepankan model sinergis dan partisipatif, reintegrasi sosial tidak hanya menjadi kewajiban institusional semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadaban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada pimpinan dan jajaran Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung, instansi terkait, serta masyarakat yang telah turut berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Bandung. (2023a). Kabupaten/Kota dalam Angka – Bandung.
- BPS Kota Bandung. (2023b). Profil Ekonomi Kota Bandung.
- BPS RI. (2023). Statistik Ekonomi: Jasa Pribadi dan Rumah Tangga.
- Chambers, R. (1994). *Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, Potentials and Paradigm*. World Development.
- Dinas Perhubungan dan Penataan Ruang. (2023). Profil Kota Bandung.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (2021). Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Kemasyarakatan. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Ismail, M. (2020). Karakteristik Psikososial Klien Pemasarakatan dalam Reintegrasi Sosial. *Jurnal Pemasarakatan*, 10(1)(45–59).
- Kementerian Hukum & HAM RI. (2022). Pedoman Pelaksanaan Bapas dan POKMAS LIPAS.
- Kementerian Sosial RI. (2020). Pedoman Umum Penanganan Orang Dengan Masalah Sosial (ODMS).
- Kusnadi, R. (2020). Mobilitas Sosial di Jawa Barat: Studi Kasus Kota Bandung. *Jurnal Mobilitas*, 8(1), 45–58.
- Laporan Internal Yayasan Anugrah Insan Residivist. (2025). Profil Klien dan Program Kemandirian.
- Lestari, D., & Febriani, A. (2020). Stigma Sosial terhadap Mantan Narapidana di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2).
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. Sage Publications.
- Mulyana A. (2019). *Kearifan Lokal Sunda dan Peranan Budaya dalam Pembangunan Sosial*. Pustaka Sunda.
- Pemkot Bandung. (2023). *Data Kemitraan Lembaga Kota Bandung*.
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang POKMAS LIPAS.
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Binaan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- Pratiwi, A. I., & Priatmono, B. (2024). Pemberdayaan, Klien, Bapas Peran Balai Pemasarakatan Dalam Melakukan Pemberdayaan Klien Pemasarakatan di Bapas Kelas II Serang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Poltekip*, 2(2), 25–34. <https://doi.org/10.52472/jpmp.v2i2.135>
- Soetomo. (2012). Pembangunan Masyarakat: Intervensi Komunitas dan Pengembangan Potensi Sosial. *Pustaka Pelajar*.
- Suharyanto, A. (2021). Studi Ruang Publik Kota Bandung: Fungsi, Aksesibilitas, dan Symbolisme. *Jurnal Tata Kota*, 15(2), 78–89.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan (2022).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.
- Zulkifli, F. (2020). Pendekatan Motivasi dalam Pembimbingan Klien Pemasarakatan. *Jurnal Psikososial*, 5(1), 12–23.